

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara-negara di seluruh dunia menganjurkan agar setiap anak memiliki kesempatan untuk pergi ke sekolah umum, namun kenyataannya banyak anak, khususnya anak-anak penyandang hambatan/cacat, ditolak untuk kesempatan ini (UNICEF 2013, p. 3. )Hal ini terutama terjadi di negara-negara berkembang. Misalnya, di 2005 diperkirakan kurang dari 10% anak-anak penyandang hambatan/ cacat memiliki akses terhadap segala bentuk pendidikan di negara-negara Asia Tenggara (Chapman & Sarvi, 2017, p. 30. )Keadaan ini dapat dikaitkan dengan berbagai alasan, seperti keterlibatan beberapa kementerian dan pemangku kepentingan nonpemerintah dalam mendukung penyandang hambatan/ cacat, usaha terbatas dilakukan untuk mengumpulkan data dan kepekaan budaya tentang tingkat pengakuan adanya penyandang hambatan/cacat (Sharma & Ng, 2014. )Meskipun demikian, negara- negara di Asia Tenggara terus maju dengan mengembangkan program pendidikan atau sekolah inklusi.

Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) yang menegaskan “setiap warga berhak mendapatkan pendidikan”; Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (2) yang menegaskan “setiap warga anak a wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi ditengah masyarakat.

Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapat perhatian lebih. Pendidikan inklusi sebagai layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama anak normal (non-ABK) usia sebayanya di kelas anak biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Menerima ABK di Sekolah Dasar terdekat merupakan mimpi yang indah yang dirasakan orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus.

Secara khusus, salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam Peraturan

Menteri (Permendiknas) no. 70 (2009) adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, melalui pendidikan kecerdasan atau bakat istimewa, melalui pendidikan inklusi ABK dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan inklusi mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus tetap dilayani di sekolah reguler secara bersama-sama dengan teman seusiannya.

Sekolah inklusi merupakan salah bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dan sebagai upaya pensosialisasian ABK kepada masyarakat. Sekolah inklusi adalah istilah yang di terapkan untuk mendidik siswa dengan dan tanpa gangguan bersama-sama dalam kelas reguler dilingkungan.

Walauapun penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia sampai saat ini masih mengundang kontroversi, namun praktek sekolah inklusif memiliki berbagai sisi positif. Misalnya, adanya sikap positif bagi siswa berkebutuhan khusus yang dapat mengembangkan kemampuan komunikasi dan interaksi melalui relasi dengan teman sebaya. Siswa reguler belajar untuk bisa lebih memahami, mengharagai dan menumbuhkan rasa nyaman terhadap perbedaan individual. Selain itum anak berkebutuhan khusus juga belajar keterampilan sosial dan menjadi siap untuk tinggal di masyarakat karena mereka dimasukkan dalam sekolah umum. Melalui sekolah inklusif, anak berkebutuhan khusus terhindar dari dampak negative dari sekolah segregasi, antara lain kecenderungan pendidikannya yang kurang berguna untuk kehidupan nyata, label "cacat" yang memberi stigma pada anak dari sekolah segregasi membuat anak berkebutuhan khusus merasa inferior, serta kecilnya kemungkinan untuk saling bekerjasama, dan menghargai perbedaan.

Pelayanan pendidikan yang terjadi di Indonesia masih mengalami hambatan, hambatan yang terjadi selama ini adalah kurangnya pengetahuan guru tentang anak berkebutuha khusus, minimnya keterampilan guru dalam menangani ABK dan sikap guru terhadap ABK yang dilihat masih memandang sebelah mata. Guru adalah seorang pendidik yang bertugas untuk mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik mulai dari usia dini sampai ke perguruan tinggi. Guru sebagai ujung tombak pendidikan yang dianggap pandai dan berwawasan, sehingga guru dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dengan mendidik anak tanpa membeda-bedakan (Undang-undang nomor 14 tahun 2005). Hal tersebut menunjukkan bahwa guru harus memiliki kompetensi diberbagai bidang ilmu terutama guru sekolah dasar sehingga guru tersebut dianggap sebagai guru yang berkompeten. Kompetensi guru adalah kemampuan melakukan tugas mengajar dan mendidik yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan, Menurut Suparlan, (2006) dan Mulyasa, (2007) dalam kompetensi guru terdapat pengetahuan, sikap penerimaan, keterampilan dan nilai-nilai yang ditunjukkan guru dalam mengajar. Hal tersebut juga harus dimiliki oleh guru-guru disekolah inklusi, sehingga dalam menangani anak berkebutuhan khusus guru-guru memiliki kemampuan yang cukup

memadai dan bisa menyesuaikan dirinya kepada anak berkebutuhan khusus (ABK).

Dengan demikian, pengadaan bangunan sekolah inklusi yang memperhatikan segala kebutuhan dari setiap individu anak yang memiliki kemampuan yang berbeda dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan fungsi dari sekolah inklusi itu sendiri. Dalam perencanaan sekolah inklusi, untuk membentuk lingkungan pembelajaran yang baik dan mengoptimalkan kemampuan peserta didik, dirasa perlu untuk melakukan pertimbangan melalui aspek psikologi anak serta perilaku anak terhadap bangunan arsitektur, khususnya bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).

Kebutuhan sekolah dasar inklusi, baik dalam pengadaan sekolah reguler bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) maupun dalam membentuk generasi yang toleran serta berkarakter baik, tidak sebanding dengan jumlah nyata dari sekolah dasar inklusi itu sendiri. Sedangkan dalam Yusuf (2014: 16) terdapat data yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SLB Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pada tahun 2007 terdapat 15.076 siswa ABK yang bersekolah di sekolah inklusi (12%) dan 66.425 siswa ABK (88%) bersekolah di SLB. Data ini menunjukkan jika pendidikan inklusi tidak dikembangkan, akan ada anak usia sekolah sejumlah 12% yang kemungkinan besar tidak mendapatkan akses pendidikan. Sehingga semakin banyak sekolah inklusi yang dikembangkan maka semakin besar peluang ABK mendapatkan akses pendidikan.

#### **Mengapa Surakarta?**

Salah satu wilayah di Kota Surakarta yang berpotensi untuk diadakannya sekolah dasar dengan orientasi inklusi dengan pertimbangan sedikitnya jumlah sekolah inklusi di Kecamatan tersebut dan kurangnya fasilitas bahkan pemahaman tentang psikologis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ujar **Kepala Pusat Layanan Autis (PLA) Dinas Pendidikan Solo, Hasto Daryanto**. Kota Surakarta menjadi salah satu lokasi berpotensi untuk adanya sekolah dasar inklusi yang layak untuk dilakukan pembangunan. Pembangunan sekolah pada wilayah tersebut dapat didukung dengan kehadiran sekolah dasar inklusi yang dapat memberikan pendidikan bagi semua serta pembentukan karakter bangsa untuk menghasilkan generasi yang lebih maju dan diharapkan untuk menjadi contoh bagaimana bangunan sekolah inklusi yang sebaiknya hadir bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Surakarta adalah terwujudnya insan yang cerdas, berkarakter dan kompetitif. Visi tersebut memiliki tujuan agar dapat meningkatkan kapasitas SDM bagi pendidikan inklusi. (Dinas Pendidikan , 2014)

#### **Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Inklusi di Surakarta:**

KECAMATAN	JENIS SEKOLAH DASAR		
	SEKOLAH UMUM	SLB	SEKOLAH INKLUSI
LAWEYAN	13	4	3

SERENGAN	10	1	3
PASAR KLIWON	23	2	4
JEBRES	13	4	2
BANJARSARI	33	6	4
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>	<b>17</b>	<b>16</b>

Tabel 1 Jumlah Sekolah Dasar di Surakarta

Sumber: Data Statistik Sekolah Dasar 2020

Data pada tabel diatas, kehadiran sekolah inklusi yang memperhatikan seluruh kebutuhan untuk setiap anak dengan kebutuhan khusus dirasa perlu dihadirkan di kecamatan Jebres yang saat ini perlu masa perkembangan dari segi pendidikannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan dapat disimpulkan perancangan ini akan berusaha mencari penyelesaian arsitektur mengenai masalah kurangnya fasilitas yang memadai dan kurangnya kompetensi guru dalam penanganan anak berkebutuhan khusus. Tugas akhir ini akan mengambil studi kasus yaitu Sekolah Dasar Inklusi di Kota Surakarta. Sebagai sekolah dasar inklusi yang akan memenuhi kebutuhan anak difabel dalam kegiatan pembelajaran maupun *universal design* serta psikologi dan perilaku anak.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah akan fokus dengan perancangan bagaimana Sekolah Dasar Inklusi menjadi sarana pendidikan dasar yang dapat memenuhi segala kebutuhan siswa dengan berbagai kemampuan yang dimiliki. Perancangan akan difokuskan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan fasilitas yang memperhatikan psikologi dan perilaku Anak Berkebutuhan Khusus.

## 1.3. Tujuan dan Sasaran

### 1.3.1. Tujuan

Tujuan dari proposal ini adalah untuk menjadi acuan dalam pembuatan LP3A kedepannya serta proposal ini juga bertujuan sebagai wadah untuk data-data terkait objek yang dapat mendukung perancangan kedepannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelatihan empati terhadap ABK pada kecenderungan perilaku prososial di sekolah inklusi.

### 1.3.2. Sasaran

Tersusunnya Laporan Pedoman Perencanaan dan Perancangan Arsitektur sebagai pedoman dan acuan dalam merancang pengembangan Sekolah Dasar Inklusi di Kota Surakarta.

## 1.4. Manfaat

#### **1.4.1. Subyektif**

- Memenuhi persyaratan untuk mengikuti Tugas Akhir periode 151 Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya, dalam penyusunan LP3A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tugas Akhir.

#### **1.4.2. Obyektif**

- Memberikan rekomendasi untuk perencanaan pembangunan sekolah di Kota Surakarta yang menerapkan pendekatan universal desain dalam pelaksanaan sekolah dasar dengan orientasi inklusi.

### **1.5. Ruang Lingkup Pembahasan**

#### **1.5.1. Subtansial**

Perencanaan dan perancangan subtansial Sekolah Dasar Inklusi di Kota Surakarta mempertimbangkan aspek fungsional, aspek kontekstual, aspek regulasi, aspek teknis dan pendekatan melalui psikologi anak.

#### **1.5.2. Spasial**

Perencanaan dan perancangan dari Sekolah Dasar Inklusi di Kota Surakarta.

### **1.6. Metode Pembahasan**

Metode deskriptif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara : studi pustaka/literature, data dari instansi terkait, observasi lapangan serta mencari di internet dan pengamatan survey.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab pertama yang berisi jawaban apa dan mengapa studi ini diperlukan. Menguraikan tentang gambaran umum tema utama berupa latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika pembahasan, dan alur pikir.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berfungsi sebagai peninjauan kembali pustaka mengenai masalah yang berkaitan dengan topik dan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur.

#### **BAB III DATA**

Membahas tentang tinjauan Provinsi Jawa Tengah serta Kota Surakarta dengan perencanaan perancangan berupa data fisik dan nonfisik yang merupakan fakta di lapangan dengan standarisasi tipologi bangunan inklusi dan memaparkan keadaan tapak bangunan rancangan.

#### **BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN**

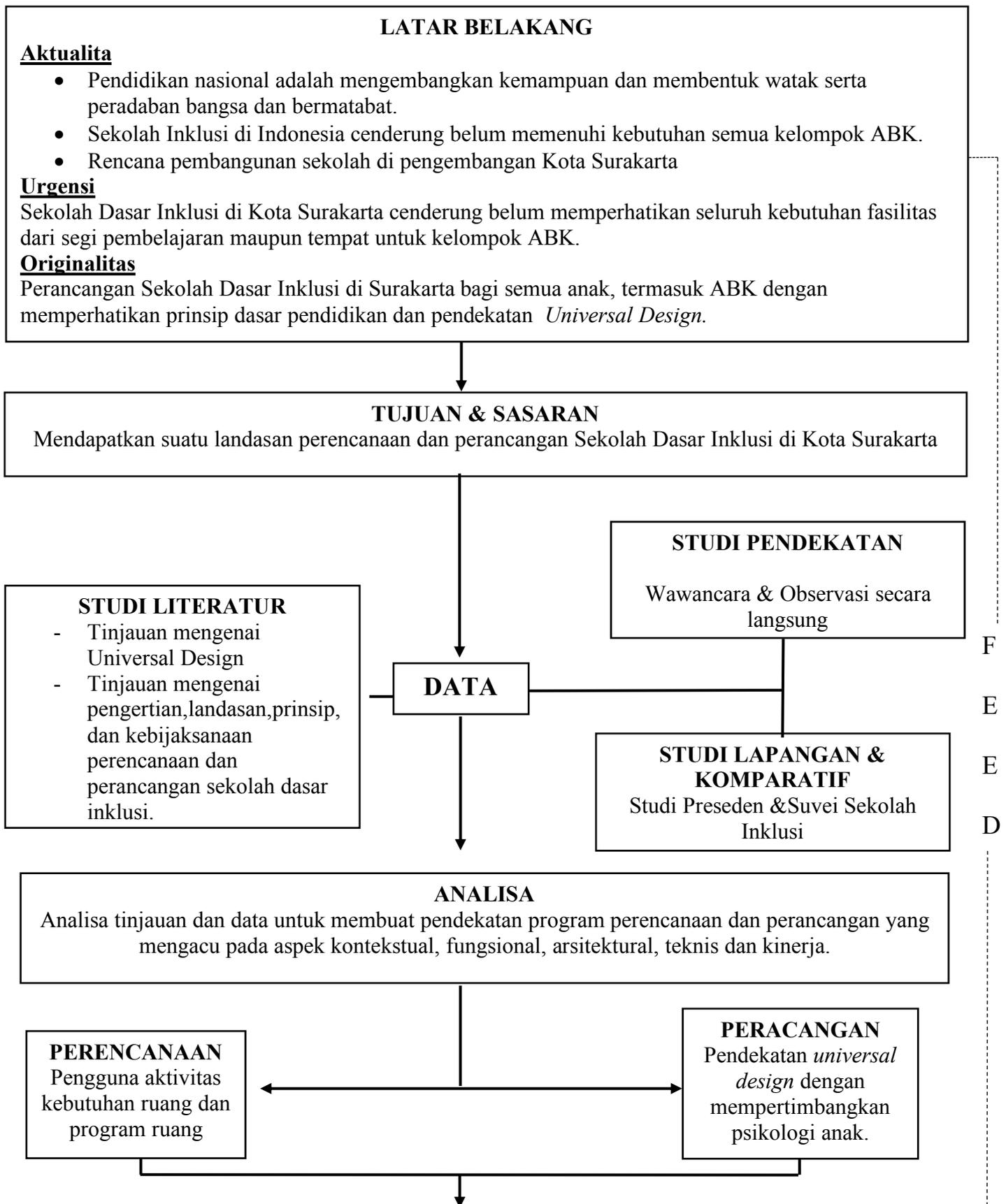
Menguraikan pendekatan perencanaan dan perancangan Sekolah Dasar Inklusi dari

beberapa aspek yang berkaitan dengan karakteristik, pelaku aktivitas, dan ruang yang dibutuhkan. Selain itu, memfokuskan kepada struktur bangunan yang digunakan dan pendekatan konsep *universal design*.

## **BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN DALAM ASPEK FUNGSIONAL**

Menyimpulkan rumusan hasil pembahasan analisis aspek-aspek perencanaan dan perancangan bangunan Sekolah Dasar Inklusi di Kota Surakarta.

## 1.8. Alur Pikir



**LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  
SEKOLAH DASAR INKLUSI DI KOTA SURAKARTA**